

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP EFEK SAMPING VAKSIN COVID-19 MENURUT UNDANG UNDANG KESEHATAN

ABSTRAK

RAMANATHAN

183311042009

Program vaksinasi covid-19 telah dimulai Indonesia sejak pertengahan Januari 2021. Meski demikian, banyak kelompok yang menolak berpartisipasi dalam program ini sehingga menambah daftar panjang tantangan bagi program vaksin pemerintah yang diprediksi baru akan selesai 10 tahun ke depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) aturan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat menurut undang-undang; 2) tanggungjawab pemerintah terhadap efek samping vaksin Covid-19 dan 3) dampak yang ditimbulkan jika masyarakat menolak di vaksin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normati dan analisa data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian. Hasil analisis diperoleh: 1) Aturan pelaksanaan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat di atur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut peraturan menteri kesehatan bahwa pelaksanaan vaksinasi dilakukan pada fasilitas kesehatan namun demikian vaksinasi dapat dilakukan diluar fasilitas kesehatan; 2) Tanggungjawab pemerintah terhadap efek samping vaksin covid-19 belum terlihat di masyarakat sehingga menimbulkan dampak penolakan vaksinasi karena efek samping yang paling fatal dari vaksinasi covid-19 adalah dapat menyebabkan kematian selain kekhawatiran terhadap kehalalan vaksin covid-19. Selain itu tidak ditemukan adanya suatu aturan khusus tentang kompensasi yang dimaksud dalam peraturan-peraturan yang ada bagi orang yang meninggal pasca divaksin; 3) Dampak hukum jika masyarakat menolak di vaksin dapat diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) yang dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, namun narasi dari pasal yang dimaksud tidak sejalan dengan maksud penolakan vaksin sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dalam penegakkan sanksi kepada masyarakat yang menolak di vaksin.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Vaksinasi, Covid-19

LEGAL POLICY ON SIDE EFFECTS OF THE COVID-19 VACCINE ACCORDING TO HEALTH LAW

ABSTRACT

ABSTRAK

RAMANATHAN

183311042009

Health of the Republic of Indonesia Number: 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Pandemic which refers to Law Number: 36 of 2009 concerning Health , Law Number: 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases and Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. According to the regulation of the minister of health that vaccination is carried out at health facilities, however, vaccination can be carried out outside health facilities; 2) The government's responsibility for the side effects of the covid-19 vaccine has not yet been seen in the community so that it has the impact of refusing vaccination because the most fatal side effect of the covid-19 vaccination is that it can cause death apart from concerns about the halalness of the covid-19 vaccine In addition, there is no specific rule regarding compensation as referred to in the existing regulations for people who die after being vaccinated;3) The legal impact if the community refuses to be vaccinated can be given sanctions based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number: 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the 2019 Corona Virus Disease (Covid19) Pandemic which is linked to Article 14 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number: 4 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases, but the narrative of the article in question is not in line with the intention of refusing vaccines so that it can lead to multiple interpretations in enforcing sanctions on people who refuse to be vaccinated.

Keywords: Legal Policy, Vaccination, Covid-19